



No. Katalog: 2303003.94

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA

<http://papua.bps.go.id>

2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

**PROFIL KETENAGAKERJAAN
PROVINSI PAPUA
2013**

<http://papua.bps.go.id>

PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2013

ISBN : -
No Publikasi : 94000.1409
Katalog BPS : 2303003.94
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : *ix + 70 halaman*

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua setiap tahun menerbitkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Profil Ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2013. Profil Ketenagakerjaan berisi informasi seputar keadaan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan Gambaran fenomena sosial terutama di bidang tenaga kerja dan Gambaran tentang capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberi perhatian sehingga publikasi ini bisa terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna menyempurnakan penerbitan publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat untuk semua, terima kasih.

Jayapura, Agustus 2014
Kepala BPS Provinsi Papua



Ir. Didik Koesbianto, M.Si
NIP.19650809 198702 1 001

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

Ir. Didik Koesbianto, M.Si

Editor

Suntono, SE, M.Si

Penulis dan Pengolah Data

Paul Santoso, S.ST

Layout

Paul Santoso, S.ST

Desain Cover

Ikfina Chairani, S.ST

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Organisasi Penulisan	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Konsep dan Definisi	5
Bab III Penduduk Usia Kerja	15
3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	15
3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota	17
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama	18
Bab IV Penduduk Angkatan Kerja.....	21
4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	21
4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota	22
4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	24
Bab V Penduduk Bekerja	29
5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur	29
5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota	31
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan ...	34
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	36

5.5	Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	42
5.6	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan.....	44
5.7	Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal Informal	48
Bab VI Pengangguran.....		51
6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur.....	51
6.2	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota.....	52
6.3	Pengangguran menurut Keegiatannya	54
6.4	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan	55
6.5	Setengah Pengangguran	56
Bab VII Indikator Ketenagakerjaan.....		59
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	59
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	61
7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).....	63
7.4	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja.....	65
7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja.....	66
Bab VIII Kesimpulan.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013.....	16
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	17
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	20
Tabel 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	23
Tabel 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013	26
Tabel 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	32
Tabel 5.2	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013.....	35
Tabel 5.3	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013.....	37
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013.....	38
Tabel 5.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013.....	41
Tabel 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013	42

Tabel 5.7	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2013.....	44
Tabel 6.1	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	53
Tabel 6.2	Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	54
Tabel 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	60
Tabel 7.2	Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	62
Tabel 7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	64
Tabel 7.4	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2013	65
Tabel 7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2013	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan Sakernas.....	5
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013	19
Gambar 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013	22
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Topografi dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	24
Gambar 4.3	Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013.....	25
Gambar 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013.....	30
Gambar 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013	31
Gambar 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013.....	33
Gambar 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013.....	34
Gambar 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013.....	40
Gambar 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2013	43

Gambar 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	45
Gambar 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013.....	46
Gambar 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2013.....	47
Gambar 5.10	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	48
Gambar 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013	49
Gambar 6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	52
Gambar 6.2	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013.....	56
Gambar 6.3	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013	57
Gambar 6.4	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013	58
Gambar 7.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013.....	60

BAB I. PENDAHULUAN

<http://paperkit.net>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu wilayah. Jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, angka pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, strategi/perencanaan di bidang ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, data yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu disediakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sebelum tahun 2011 SAKERNAS dilaksanakan 2 kali setahun, namun mulai tahun 2011 dilaksanakan 4 kali setahun (4 triwulan). Secara umum SAKERNAS yang dilaksanakan setiap triwulan dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan tenaga kerja sampai level provinsi. Sementara itu, khusus untuk triwulan III (Agustus) dapat menyajikan data sampai level kabupaten/kota.

Melalui survei ini dapat diperoleh Gambaran umum ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah pengangguran, tingkat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Selain itu,

Data ketenagakerjaan diperoleh dari SAKERNAS. Mulai tahun 2011, SAKERNAS dilaksanakan 4 kali setahun.

indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diketahui.

Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang terbilang kompleks. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.536.728 meningkat menjadi 1.585.434 pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 menjadi 1.688.876. Pada periode yang sama, angka pengangguran mengalami kenaikan dari 2,81 persen menjadi 3,23 persen. Walaupun demikian, tingkat pengangguran di Papua masih tergolong rendah dan bahkan lebih rendah dibanding angka nasional (6,25 persen). Kondisi ini semestinya menjadi kondisi ideal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah demikian. Walaupun angka pengangguran terbilang rendah dan angkatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak serta merta berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Di tingkat nasional, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 30,05 persen (kondisi Maret 2014).

Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibanding angka nasional.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Papua di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan keahlian rendah, jenis pekerjaan yang dilakukan pun adalah yang tidak membutuhkan *skill* tinggi, seperti bertani. Dampaknya pendapatan yang diterima juga relatif kecil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

Permasalahan mendasar ketenagakerjaan di Papua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

Publikasi ini rutin disusun setiap tahun untuk memberikan Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua. Selain itu, dalam publikasi ini juga memuat penjelasan, konsep dan definisi juga istilah-istilah (terminologi) ketenagakerjaan, sehingga pembaca dapat lebih memahami data dan informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Publikasi Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua 2013 disusun dari data SAKERNAS bulan Agustus 2013. Pembahasan dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten/kota, mengingat kecukupan jumlah sampel hanya untuk estimasi sampai level kabupaten/kota. Di beberapa kabupaten tidak dapat dilakukan estimasi karena syarat kecukupan sampel tidak terpenuhi (pemasukan dokumen rendah). Sebagai contoh, pada Kabupaten Pegunungan Bintang tidak dapat dikeluarkan indikator ketenagakerjaan karena sampel tidak cukup untuk estimasi.

*Pembahasan
dibatasi sampai
tingkat
kabupaten/kota
di Provinsi Papua*

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui komposisi penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, dan sektor formal/informal;
- Mengetahui karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan jenis kegiatan;
- Mengetahui indikator ketenagakerjaan di setiap kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari delapan bab, dijabarkan sebagai berikut:

Bab I. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.

Bab III. Membahas tentang karakteristik penduduk usia kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan kegiatan terbanyak selama seminggu yang lalu.

Bab IV. Berisi tentang karakteristik angkatan kerja, termasuk didalamnya bukan angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, kabupaten/kota, dan pendidikan.

Bab V. Menjelaskan tentang kondisi penduduk yang bekerja yang dirinci menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan kabupaten/kota.

Bab VI. Berisi karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan kabupaten/kota.

Bab VII. Membahas tentang perkembangan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, meliputi: TPAK, TPT, dan TKK.

Bab VIII. Kesimpulan

An orange scroll banner with a white background and a thin orange border. The banner is centered horizontally and has a slight 3D effect with a shadow on the left side.

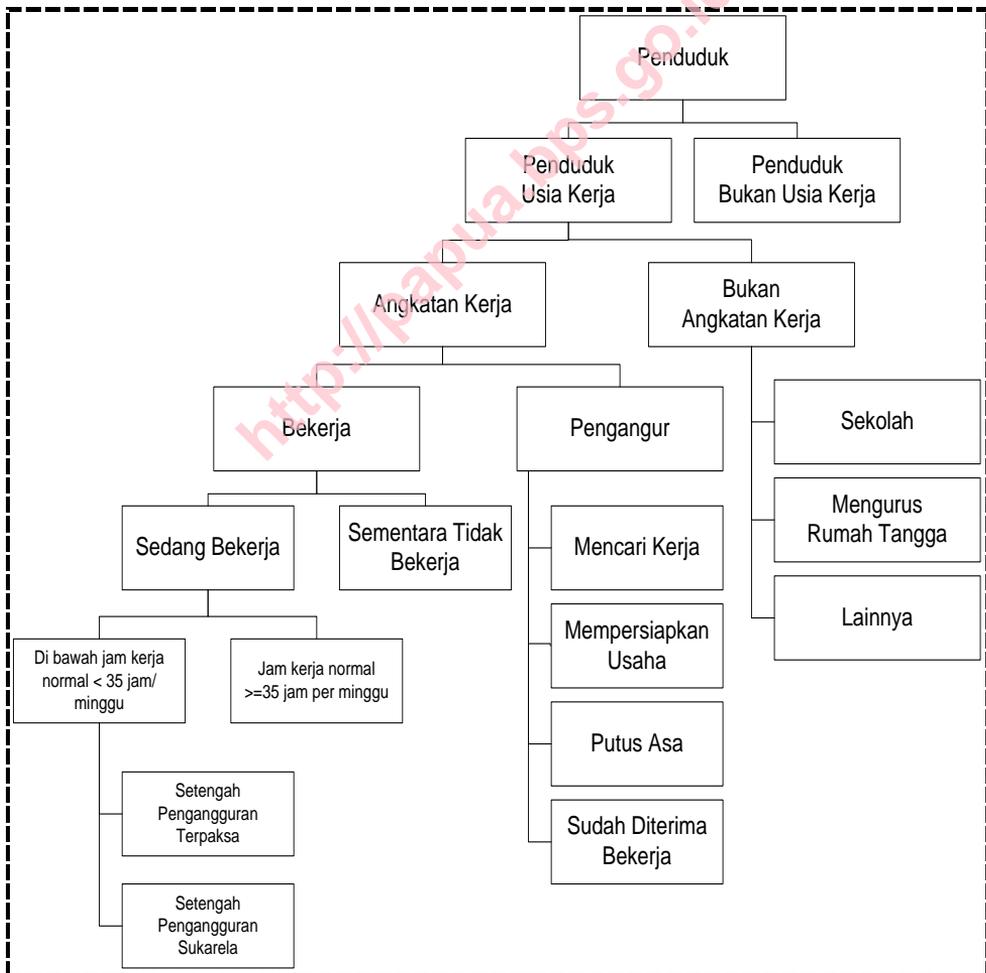
BAB II. KONSEP & DEFINISI

<http://paperkit.net>

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan berikut:

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Sakernas



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

2.1 Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

2.2 Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.3 Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Mulai tahun 2011, mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. **Misalnya:** dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

Klasifikasi Formal–Informal,

Beberapa pihak, mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada bagan berikut :

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Buruh/Karyawan/Pegawai	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Pekerja Bebas di Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Bebas di Non Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Tak Dibayar	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>

Note : F = Formal

INF=Informal

2.4 Penduduk Pengangguran

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada *“An ILO Manual on Concepts and Methods”*)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang **“baru”**, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila

“tindakannya nyata”, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat ijin usaha, dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- a. **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

2.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang tidak termasuk Angkatan Kerja yang dibedakan

menurut jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak antara lain sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

- a. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
- b. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- c. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

2.6 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

2.7 Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan, dan sebagainya.

2.8 Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

2.9 Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan ini mengikuti KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) 2002 yang mengacu pada ISCO 88.

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

2.10 Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan

sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).
- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.

Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

<http://papua.bps.go.id>

BAB III.

PENDUDUK USIA KERJA

<http://paperkit.io>

BAB III

PENDUDUK USIA KERJA

3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Mereka yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja biasa disebut dengan angkatan kerja. Sementara itu mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja.

Jumlah penduduk usia kerja di Papua tahun 2013 sebesar 2.165.070 orang

Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.165.070 orang. Sekitar 81,98 persennya didominasi oleh penduduk usia muda (15 sampai 44 tahun). Sementara itu 18,02 persen merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas. *Supply* tenaga muda yang besar ini menjadi potensi yang luar biasa jika diiringi dengan peningkatan kualitas berupa keahlian dan keterampilan.

Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Secara umum persentase penduduk usia kerja laki-laki (58,75 persen) lebih banyak dibanding perempuan (41,24 persen). Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin di Papua di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur,

persentase terbesar penduduk usia kerja adalah kelompok umur 30-34 tahun yang mencapai 18,28 persen.

Tabel 3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013

Kel Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	% Penduduk Usia Kerja		% Kel Umur
	L	P		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	203754	159667	363421	56,07	43,93	16,79
20-24	123938	143634	267572	46,32	53,68	12,36
25-29	141785	156312	298097	47,56	52,44	13,77
30-34	180782	171365	352147	51,34	48,66	16,26
35-39	144153	137870	282023	51,11	48,89	13,03
40-44	131940	96997	228937	57,63	42,37	10,57
45-49	88449	62448	150897	58,62	41,38	6,97
50-54	61517	43168	104685	58,76	41,24	4,84
55-59	31919	23049	54968	58,07	41,93	2,54
60+	37445	24878	62323	60,08	39,92	2,88
Jumlah	1145682	1019388	2165070	52,92	47,08	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Dominasi peran penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus menjadi *big opportunity* bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilannya, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi *point* penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, dan sesuai dengan dunia usaha yang membutuhkan.

3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk usia kerja umumnya sebanding dengan jumlah penduduknya. Sebaran jumlah penduduk usia kerja menurut kabupaten/kota tahun 2013 secara lengkap (kecuali pada Kabupaten Asmat tidak tersedia datanya karena tidak memenuhi minimal sampel untuk estimasi) tersaji pada Tabel 3.2 berikut. Jumlah penduduk usia kerja paling tinggi berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 211.901 orang atau sekitar 9,79 persen penduduk usia kerja di Papua. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk usia kerja paling sedikit adalah Kabupaten Supiori sebanyak 10.596 orang atau sekitar 0,49 persen dari seluruh jumlah penduduk usia kerja di Papua.

Penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kota Jayapura dan terendah di Kabupaten Supiori.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Dogiyai yang mempunyai penduduk usia kerja perempuan (50,73 persen) lebih banyak dibanding laki-laki (49,27 persen).

Tabel 3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	81.094	71.827	152.921	7,06
9402. Jayawijaya	78.403	75.402	153.805	7,10
9403. Jayapura	46.540	40.009	86.549	4,00
9404. Nabire	55.007	46.708	101.715	4,70
9408. Kepulauan Yapen	31.086	29.285	60.371	2,79
9409. Biak Numfor	48.532	45.791	94.323	4,36
9410. Paniai	58.977	55.643	114.620	5,29
9411. Puncak Jaya	45.955	40.288	86.243	3,98
9412. Mimika	85.312	60.549	145.861	6,74

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9413. Boven Digoel	23.649	18.497	42.146	1,95
9414. Mappi	29.242	26.739	55.981	2,59
9415. Asmat*)	[27.229]	[24.821]	[52.050]	[2,40]
9416. Yahukimo	63.218	58.507	121.725	5,62
9417. Pegunungan Bintang	25.427	22.317	47.744	2,21
9418. Tolikara	46.584	41.803	88.387	4,08
9419. Sarmi	14.351	11.089	25.440	1,18
9420. Keerom	21.190	16.782	37.972	1,75
9426. Waropen	9.762	8.739	18.501	0,85
9427. Supiori	5.562	5.034	10.596	0,49
9428. Mamberamo Raya	6.569	5.880	12.449	0,57
9429. Nduga	29.332	26.262	55.594	2,57
9430. Lanny Jaya	57.955	53.754	111.709	5,16
9431. Mamberamo Tengah	15.346	14.254	29.600	1,37
9432. Yalimo	21.078	19.103	40.181	1,86
9433. Puncak	36.353	33.998	70.351	3,25
9434. Dogiyai	29.486	30.361	59.847	2,76
9435. Intan Jaya	15.734	14.845	30.579	1,41
9436. Deiyai	23.057	22.852	45.909	2,12
9471. Kota Jayapura	113.652	98.249	211.901	9,79
Jumlah	1.145.682	1.019.388	2.165.070	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencakupi estimasi kabupaten.

3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua adalah banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun ke bawah). Meskipun mereka aktif secara ekonomi, namun mereka tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk

usia kerja. Kedua, masih menganut asas eksklusivitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua yang berusia 15 tahun ke atas adalah bekerja (76 persen). Sementara itu, persentase penduduk yang menganggur sebanyak 3 persen. Selanjutnya sebanyak 22 persen penduduk usia kerja tidak terlibat secara aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan lainnya masing-masing sebesar 11 persen, 9 persen, dan 2 persen.

Salah satu ukuran kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Lebih dari setengah penduduk usia kerja masih berpendidikan rendah. Ada sebanyak 41,87 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau bahkan belum pernah

bersekolah, selanjutnya sebanyak 16,78 persen berpendidikan SD. Sementara itu, penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 5,87 persen.

Sejalan dengan hal itu, jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (54 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (46,40 persen). Namun sebaliknya untuk pendidikan SD ke atas secara persentase perempuan kalah dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa di Papua secara umum laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

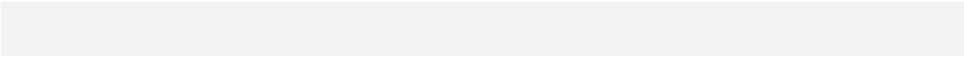
- Sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan sangat rendah

- Tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki

Tabel 3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
di bawah SD	420.560	485.893	906.453
<i>(persentase)</i>	46,40	54	100,00
SD	193.467	169.939	363.406
<i>(persentase)</i>	53,24	47	100,00
SLTP	193.650	140.748	334.398
<i>(persentase)</i>	57,91	42	100,00
SLTA	265.981	167.648	433.629
<i>(persentase)</i>	61,34	39	100,00
PT	72.024	55.160	127.184
<i>(persentase)</i>	56,63	43	100,00
Total	1.145.682	1.019.388	2.165.070
<i>(persentase)</i>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013



BAB IV.
PENDUDUK ANGKATAN
KERJA

<http://pabubps.go.id>

BAB IV

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jumlah penduduk angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian. Aktif di sini berarti bahwa mereka berusaha untuk menghasilkan/memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan.

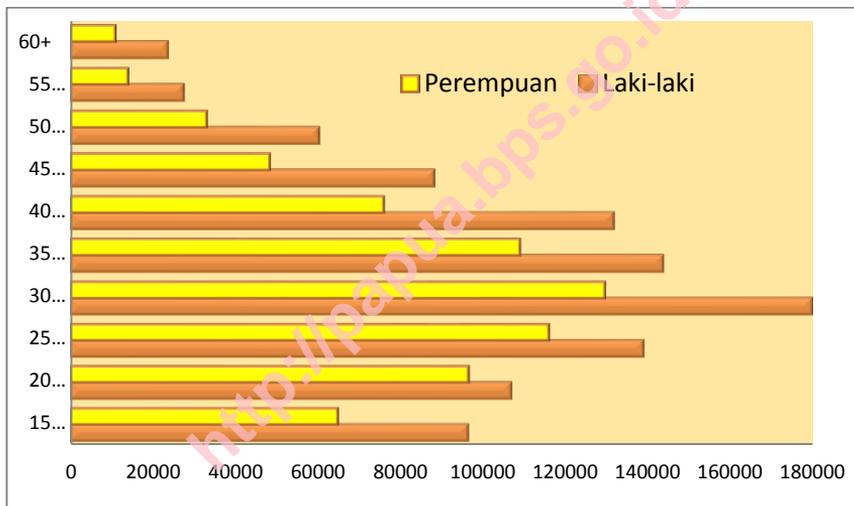
Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.688.876 orang. Hampir 58,75 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 41,25 persen adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri walaupun jumlah penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan secara jumlah tidak terpaut jauh, namun kenyataannya laki-laki lebih banyak terlibat secara aktif dalam ekonomi dibanding perempuan. Sekitar 22,19 persen perempuan yang termasuk usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga daripada terlibat secara aktif dalam perekonomian.

- *Jumlah angkatan kerja di Papua tahun 2013 sebesar 1.688.876 orang.*
- *Angkatan kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun.*

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk apakah mereka akan masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15-19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih sekolah daripada bekerja atau mencari kerja. Dengan semakin meningkatnya umur, maka makin banyak penduduk yang aktif dalam

perekonomian, sampai mencapai puncaknya pada usia 30 an. Dan selanjutnya jumlah angkatan kerja akan kembali menurun seiring dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja. Gambaran mengenai jumlah penduduk angkatan kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersaji pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

4.2 Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota

Sebaran angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Papua tidak tergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di Kota Jayapura tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Tabel 4.1 di bawah menyajikan jumlah angkatan kerja per kabupaten/kota pada tahun 2013.

Angkatan kerja paling tinggi terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 134.888 orang. Menyusul berikutnya adalah Kota

Jayapura dengan angkatan kerja sebanyak 131.765 orang. Sedangkan Kabupaten Supiori mempunyai jumlah angkatan kerja paling kecil yaitu sebesar 5.817 orang.

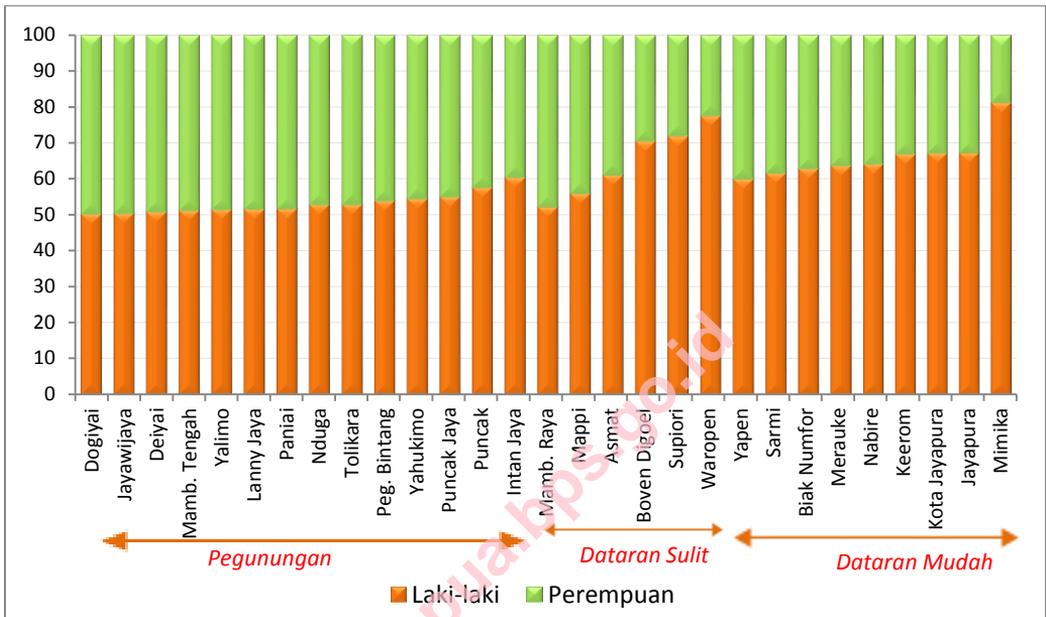
Tabel 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	68.512	39.079	107.591
9402. Jayawijaya	68.117	66.771	134.888
9403. Jayapura	35.855	17.390	53.245
9404. Nabire	46.232	25.788	72.020
9408. Kepulauan Yapen	24.741	16.466	41.207
9409. Biak Numfor	37.333	22.056	59.389
9410. Paniai	56.719	52.800	109.519
9411. Puncak Jaya	39.217	31.966	71.183
9412. Mimika	72.406	16.785	89.191
9413. Boven Digoel	21.200	8.851	30.051
9414. Mappi	24.880	19.583	44.463
9415. Asmat*)	[24.153]	[15.395]	[39.548]
9416. Yahukimo	58.632	48.809	107.441
9417. Pegunungan Bintang	24.647	21.014	45.661
9418. Tolikara	39.081	34.691	73.772
9419. Sarmi	11.803	7.348	19.151
9420. Keerom	18.014	8.910	26.924
9426. Waropen	7.983	2.317	10.300
9427. Supiori	4.189	1.628	5.817
9428. Mamberamo Raya	5.764	5.253	11.017
9429. Nduga	28.479	25.350	53.829
9430. Lanny Jaya	55.447	51.851	107.298
9431. Mamberamo Tengah	14.806	14.054	28.860
9432. Yalimo	18.352	17.234	35.586
9433. Puncak	33.271	24.398	57.669
9434. Dogiyai	27.523	27.118	54.641
9435. Intan Jaya	14.525	9.493	24.018
9436. Deiyai	21.837	20.995	42.832
9471. Kota Jayapura	88.540	43.225	131.765
Jumlah	992.258	696.618	1.688.876

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Angkatan Kerja menurut Topografi dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013



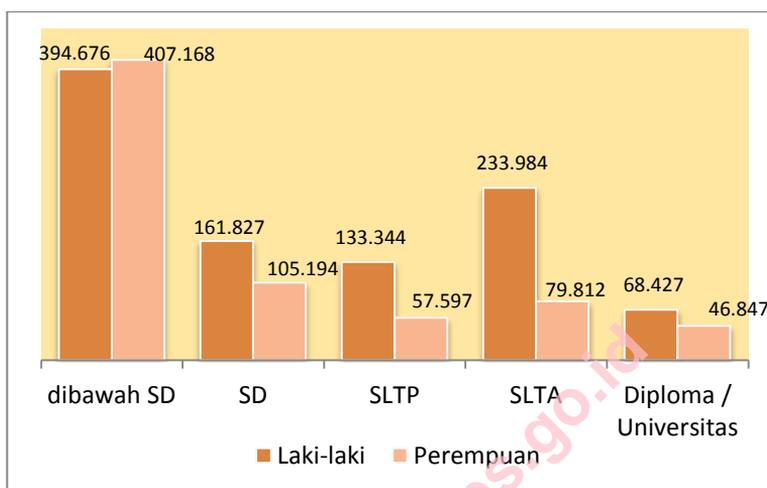
Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin pada masing-masing kabupaten/kota bervariasi dan tergantung pada topografi wilayahnya. Kabupaten/kota yang termasuk dataran mudah, jumlah angkatan kerja laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, minimum perbandingannya adalah 6 dibanding 4. Begitu pula untuk kabupaten dataran sulit, laki-laki masih mendominasi angkatan kerja. Sementara itu, di daerah pegunungan jumlah angkatan kerja hampir sepadan/sama antara laki-laki dan perempuan.

4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua terdapat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar angkatan kerja di Papua masih memiliki pendidikan lebih rendah dari SD. Persentase angkatan kerja yang tidak tamat SD atau bahkan yang belum pernah sekolah ada sebanyak 47,48 persen. Di sisi lain mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Universitas) hanya sekitar 6,83 persen.

Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Dari Gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada level pendidikan di bawah SD terlihat bahwa dari sisi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, semakin tinggi level pendidikan, ternyata laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Sebagai contoh pada level pendidikan SLTA, persentase laki-laki adalah sebanyak 74,57 persen, sedangkan perempuan hanya 25,43 persen. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Tabel 4.2 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	21.810	30.168	17.345	26.150	12.118
9402. Jayawijaya	73.934	16.724	11.712	23.080	9.438
9403. Jayapura	5.381	9.717	11.506	19.135	7.506
9404. Nabire	13.061	14.338	10.484	24.406	9.731
9408. Kepulauan Yapen	7.881	7.848	6.198	13.696	5.584
9409. Biak Numfor	5.462	11.610	9.046	25.378	7.893
9410. Paniai	63.392	11.510	19.722	13.308	1.587
9411. Puncak Jaya	49.687	15.444	3.073	1.796	1.178
9412. Mimika	13.846	13.387	12.705	39.056	10.197
9413. Boven Digoel	6.838	8.478	4.436	8.701	1.598
9414. Mappi	19.221	13.220	7.336	3.175	1.511
9415. Asmat*)	[26.484]	[9.815]	[2.540]	[709]	[39.548]
9416. Yahukimo	87.394	14.109	1.147	2.813	1.978
9417. Pegunungan Bintang	31.612	8.000	2.909	2.509	631
9418. Tolikara	56.248	4.810	5.625	5.869	1.220
9419. Sarmi	3.677	6.309	4.430	3.575	1.160
9420. Keerom	5.026	6.200	4.375	8.443	2.880
9426. Waropen	1.560	1.998	1.907	3.575	1.260
9427. Supiori	1.419	1.621	804	1.371	602
9428. Mamberamo Raya	6.085	3.776	471	504	181
9429. Nduga	47.598	3.516	1.932	783	-
9430. Lanny Jaya	72.595	8.382	12.578	13.041	702
9431. Mamberamo Tengah	22.438	3.454	1.692	1.096	180
9432. Yalimo	26.227	3.470	3.675	1.270	944
9433. Puncak	51.003	2.541	2.060	1.959	106
9434. Dogiyai	19.415	22.422	9.493	2.612	699
9435. Intan Jaya	20.127	1.607	1.355	750	179
9436. Deiyai	33.085	2.965	4.063	2.201	518
9471. Kota Jayapura	9.338	9.582	16.317	63.108	33.420
Jumlah	801844	267021	190941	313796	115274

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Tingginya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD terjadi di seluruh kabupaten, kecuali pada Kabupaten Biak Numfor

dan Kota Jayapura yang masing-masing hanya 9,20 persen dan 7,09 persen. Sementara itu, Kabupaten Puncak merupakan kabupaten yang jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tidak tamat SD paling banyak yaitu mencapai 88,44 persen. Umumnya kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan, lebih dari separuh penduduk angkatan kerjanya mempunyai pendidikan SD ke bawah. Hal ini terutama disebabkan karena masih minimnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut.

Di sisi lain, kabupaten dengan persentase angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas cukup tinggi adalah Kota Jayapura (73,26 persen), Kabupaten Biak Numfor (56,02 persen) dan Kabupaten Mimika (55,22 persen). Ketiga daerah ini relatif lebih maju dibanding daerah lainnya, selain itu sebagai daerah yang berstatus kota yang biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan juga relatif lebih tinggi.

Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Biak Numfor mempunyai persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas yang cukup tinggi.

Kota Jayapura yang merupakan ibukota Provinsi Papua dan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi mempunyai kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang terbilang maju dibanding kabupaten lainnya di Papua. Hal ini akan menjadi sebuah modal dasar penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, tentunya akan menjadi catatan sendiri bagi Pemerintah dalam membangun dan mendongkrak pendidikan terutama di daerah pegunungan agar kualitas tenaga kerjanya dapat ditingkatkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.mps.go.id>

An orange scroll banner with a white border and a drop shadow, featuring a rolled-up edge on the left and a small circular detail on the right. The text is centered on the banner.

BAB V.
PENDUDUK BEKERJA

<http://paperkit5.go.id>

BAB V

PENDUDUK BEKERJA

5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

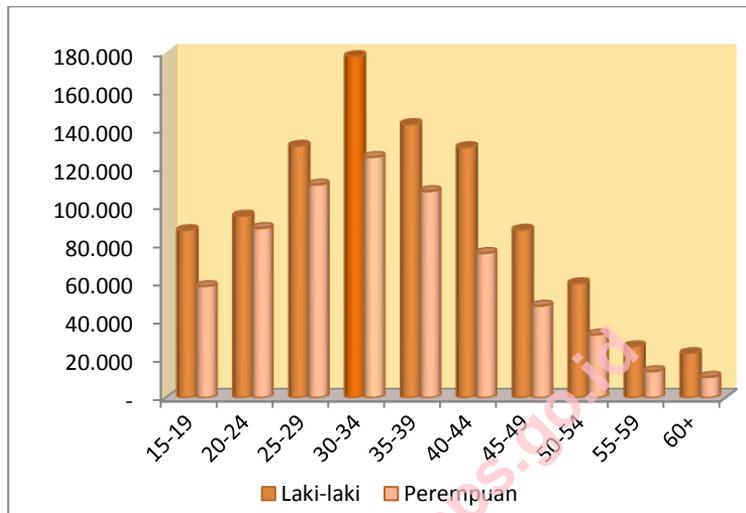
Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak 1.634.332 orang atau setara 75,49 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah tersebut 58,89 persen adalah laki-laki, sementara sisanya 41,11 persen adalah perempuan. Sementara itu, distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari Gambar 5.1 berikut.

Secara umum penduduk yang bekerja pada setiap kelompok umur memiliki pola yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja. Selanjutnya, memasuki usia prima (25 tahun ke atas) jumlah penduduk yang bekerja pun meningkat, sampai mencapai puncaknya pada kelompok usia 30-34 tahun yang mencapai 303.563 orang atau sekitar 18,57 persen. Sedangkan pekerja usia tua (55 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja ada sebanyak 4,57 persen.

Penduduk bekerja di Papua paling banyak berada pada kelompok usia 30-34 tahun.

Gambar 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013

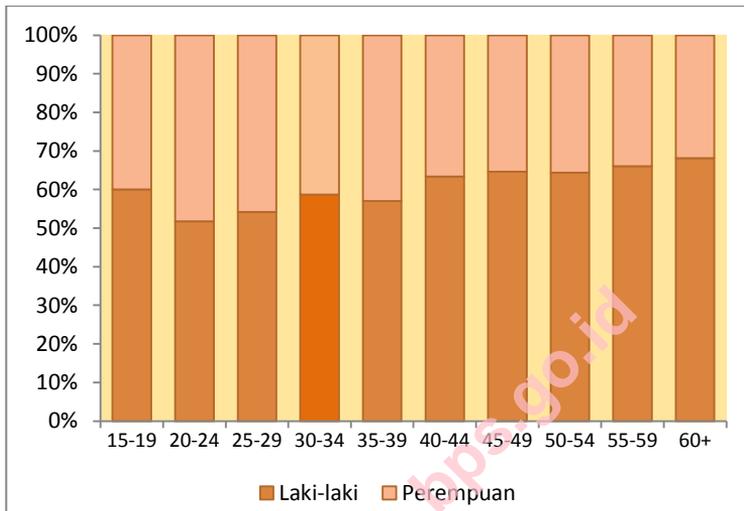


Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Selain itu, dari Gambar di atas juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berlaku pada setiap kelompok umur, di mana secara jumlah dan persentase perempuan yang bekerja berada di bawah laki-laki.

Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 64,63 persen dan 35,37 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 68,17 persen dan 31,83 persen. Gambaran persentase penduduk bekerja menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota

Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota sama dengan pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kabupaten dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi terdapat pada Kabupaten Jayawijaya, yaitu sebanyak 133.893 orang dan yang paling rendah adalah Kabupaten Supiori sebanyak 5.120 orang.

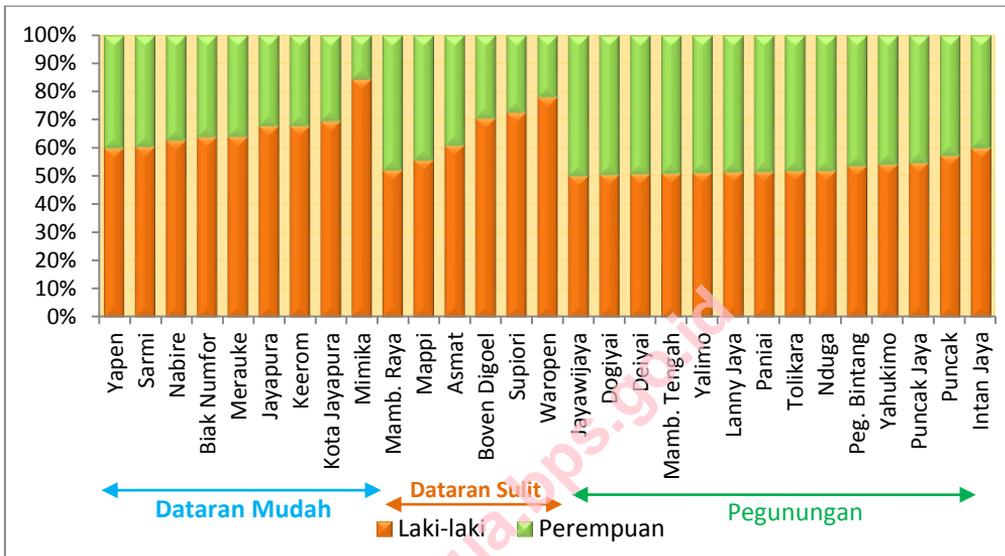
Tabel 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	65.660	36.600	102.260
9402. Jayawijaya	67.365	66.528	133.893
9403. Jayapura	33.855	15.964	49.819
9404. Nabire	43.302	25.423	68.725
9408. Kepulauan Yapen	23.297	15.380	38.677
9409. Biak Numfor	34.688	19.467	54.155
9410. Paniai	56.719	52.800	109.519
9411. Puncak Jaya	38.858	31.671	70.529
9412. Mimika	70.274	12.888	83.162
9413. Boven Digoel	20.417	8.461	28.878
9414. Mappi	24.352	19.154	43.506
9415. Asmat*)	[24.153]	[15.395]	[39.548]
9416. Yahukimo	58.449	48.751	107.200
9417. Pegunungan Bintang	23.823	20.419	44.242
9418. Tolikara	37.329	34.253	71.582
9419. Sarmi	11.115	7.220	18.335
9420. Keerom	17.366	8.165	25.531
9426. Waropen	7.650	2.127	9.777
9427. Supiori	3.729	1.391	5.120
9428. Mamberamo Raya	5.587	5.076	10.663
9429. Nduga	27.689	25.350	53.039
9430. Lanny Jaya	55.447	51.851	107.298
9431. Mamberamo Tengah	14.806	14.054	28.860
9432. Yalimo	18.298	17.234	35.532
9433. Puncak	32.531	23.959	56.490
9434. Dogiyai	26.699	25.822	52.521
9435. Intan Jaya	14.346	9.493	23.839
9436. Deiyai	21.837	20.995	42.832
9471. Kota Jayapura	82.752	36.048	118.800
Jumlah	962393	671939	1634332

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

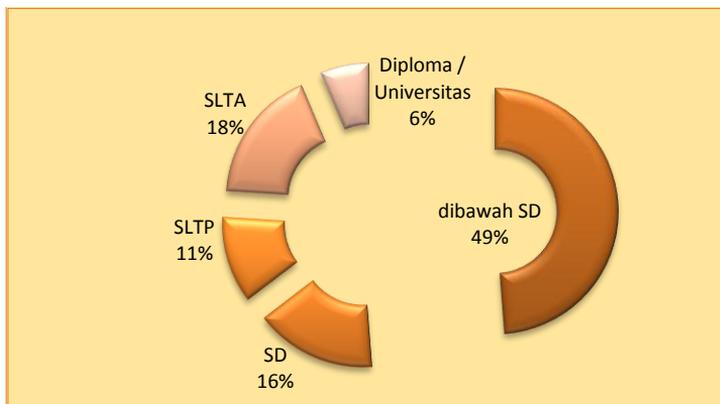
Gambar 5.3 di atas menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin. Dari Gambar tersebut tampak bahwa pada kabupaten dengan topografi berupa dataran yang mudah dijangkau, persentase penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding perempuan. Demikian halnya dengan kabupaten yang tergolong bertopografi dataran sulit, secara umum laki-laki lebih mendominasi dalam hal pekerjaan. Sebaliknya, pada beberapa kabupaten di pegunungan persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja hampir sama. Contohnya di Kabupaten Deiyai, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masing adalah 51,0 persen dan 49,0 persen, di mana secara persentase tidak terpaut jauh.

5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

Pada tahun 2013, lebih dari separuh penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah, bahkan 49 persennya merupakan penduduk yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Tingkat pendidikan berikutnya adalah SLTP dan SLTA yang berturut-turut mempunyai persentase 11 persen dan 18 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya sebanyak 6 persen.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Tabel 5.2 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9401. Merauke	21.569	28.603	17.159	34929	102.260
9402. Jayawijaya	73.934	16.261	11.712	31986	133.893
9403. Jayapura	5.381	9.589	10.859	23990	49.819
9404. Nabire	13.061	14.151	10.131	31382	68.725
9408. Kepulauan Yapen	7.649	7.848	6.082	17098	38.677
9409. Biak Numfor	5.161	11.238	8.484	29272	54.155
9410. Paniai	63.392	11.510	19.722	14895	109.519
9411. Puncak Jaya	49.576	15.196	2.783	2974	70.529
9412. Mimika	13.846	13.014	11.874	44428	83.162
9413. Boven Digoel	6.660	8.137	4.436	9645	28.878
9414. Mappi	18.981	12.852	7.151	4522	43.506
9415. Asmat*)	[26.484]	[9.815]	[2.540]	[709]	[39.548]
9416. Yahukimo	87.394	14.109	1.127	4570	107.200
9417. Pegunungan Bintang	31.008	7.596	2.576	3062	44.242
9418. Tolikara	55.645	4.609	5.223	6105	71.582
9419. Sarmi	3.677	6.202	4.162	4294	18.335
9420. Keerom	4.905	6.050	4.228	10348	25.531
9426. Waropen	1.485	1.998	1.858	4436	9.777
9427. Supiori	1.215	1.499	804	1602	5.120
9428. Mamberamo Raya	5.838	3.706	471	648	10.663
9429. Nduga	46.808	3.516	1.932	783	53.039
9430. Lanny Jaya	72.595	8.382	12.578	13743	107.298
9431. Mamberamo Tengah	22.438	3.454	1.692	1276	28.860
9432. Yalimo	26.227	3.470	3.621	2214	35.532
9433. Puncak	50.304	2.541	1.580	2065	56.490
9434. Dogiyai	19.415	20.302	9.493	3311	52.521
9435. Intan Jaya	19.948	1.607	1.355	929	23.839
9436. Deiyai	33.085	2.965	4.063	2719	42.832
9471. Kota Jayapura	9.338	9.350	15.793	84319	118.800
Jumlah	797019	259570	185489	392254	1634332

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Begitu juga jika melihat tingkat pendidikan pekerja menurut kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 5.2 di atas. Pekerja berpendidikan kurang dari SD dan tamat SD memiliki persentase terbesar dari jumlah pekerja di masing-masing kabupaten kecuali pada Kota Jayapura dengan persentase dari 15,73 persen.

Kualitas pendidikan pekerja yang masih rendah ini terutama terjadi di daerah pegunungan yang minim fasilitas pendidikan. Bahkan di Kabupaten Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo dan Intan Jaya memiliki pekerja berpendidikan kurang dari SD dengan persentase lebih dari 90 persen. Kenyataan yang menyisakan tugas berat bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pekerjanya.

Di sisi lain pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma/ Universitas) masih merupakan fenomena langka yang jarang ditemukan terutama pada kabupaten di daerah pegunungan. Buktinya adalah persentase pekerja berpendidikan tinggi rata-rata masih di bawah 1 persen. Salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan mereka, sehingga mereka akan cenderung bermigrasi ke daerah lain.

5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan Jasa. Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di bawah menggambarkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota dan lapangan pekerjaan utama.

Tabel 5.3 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	51.049	8.438	42.773	102.260
9402. Jayawijaya	114.506	187	19.200	133.893
9403. Jayapura	22.771	4.455	22.593	49.819
9404. Nabire	24.966	5.504	38.255	68.725
9408. Kepulauan Yapen	21.804	3.509	13.364	38.677
9409. Biak Numfor	11.816	7.713	34.626	54.155
9410. Paniai	102.785	408	6.326	109.519
9411. Puncak Jaya	67.422	-	3.107	70.529
9412. Mimika	20.514	27.934	34.714	83.162
9413. Boven Digoel	15.973	5.186	7.719	28.878
9414. Mappi	36.888	320	6.298	43.506
9415. Asmat*)	[34.840]	[574]	[4.134]	[39.548]
9416. Yahukimo	103.381	297	3.522	107.200
9417. Pegunungan Bintang	41.678	269	2.295	44.242
9418. Tolikara	67.318	137	4.127	71.582
9419. Sarmi	13.549	571	4.215	18.335
9420. Keerom	14.092	2.445	8.994	25.531
9426. Waropen	5.352	832	3.593	9.777
9427. Supiori	2.782	871	1.467	5.120
9428. Mamberamo Raya	10.276	-	387	10.663
9429. Nduga	52.983	-	56	53.039
9430. Lanny Jaya	106.441	-	857	107.298
9431. Mamberamo Tengah	28.860	-	-	28.860
9432. Yalimo	34.355	-	1.177	35.532
9433. Puncak	55.759	-	731	56.490
9434. Dogiyai	50.507	-	2.014	52.521
9435. Intan Jaya	23.477	-	362	23.839
9436. Deiyai	41.461	198	1.173	42.832
9471. Kota Jayapura	13.751	14.202	90.847	118.800
Jumlah	1.191.356	84.050	358.926	1.634.332

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	49,92	8,25	41,83	100,00
9402. Jayawijaya	85,52	,14	14,34	100,00
9403. Jayapura	45,71	8,94	45,35	100,00
9404. Nabire	36,33	8,01	55,66	100,00
9408. Kepulauan Yapen	56,37	9,07	34,55	100,00
9409. Biak Numfor	21,82	14,24	63,94	100,00
9410. Paniai	93,85	,37	5,78	100,00
9411. Puncak Jaya	95,59	0,00	4,41	100,00
9412. Mimika	24,67	33,59	41,74	100,00
9413. Boven Digoel	55,31	17,96	26,73	100,00
9414. Mappi	84,79	,74	14,48	100,00
9415. Asmat*)	[88,10]	[1,45]	[10,45]	100,00
9416. Yahukimo	96,44	,28	3,29	100,00
9417. Pegunungan Bintang	94,20	,61	5,19	n.a
9418. Tolikara	94,04	,19	5,77	100,00
9419. Sarmi	73,90	3,11	22,99	100,00
9420. Keerom	55,20	9,58	35,23	100,00
9426. Waropen	54,74	8,51	36,75	100,00
9427. Supiori	54,34	17,01	28,65	100,00
9428. Mamberamo Raya	96,37	0,00	3,63	100,00
9429. Nduga	99,89	0,00	,11	100,00
9430. Lanny Jaya	99,20	0,00	,80	100,00
9431. Mamberamo Tengah	100,00	0,00	0,00	100,00
9432. Yalimo	96,69	0,00	3,31	100,00
9433. Puncak	98,71	0,00	1,29	100,00
9434. Dogiyai	96,17	0,00	3,83	100,00
9435. Intan Jaya	98,48	0,00	1,52	100,00
9436. Deiyai	96,80	,46	2,74	100,00
9471. Kota Jayapura	11,57	11,95	76,47	100,00
Jumlah	72,90	5,14	21,96	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

- *Sektor Pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.*
- *Akan tetapi, pada beberapa Kabupaten/Kota sudah mengalami pergeseran dari pertanian ke industri dan jasa.*

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2013, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 1.191.356 orang atau sekitar 72,90 persen dari total seluruh pekerja. Sementara itu, sektor berikutnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua adalah sektor jasa dengan jumlah pekerja sebanyak 358.926 orang atau sekitar 22 persen. Kemudian pekerja yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 5,14 persen. Meskipun pada dasarnya kontribusi terbesar perekonomian Papua berasal dari sektor manufaktur berupa pertambangan, namun kenyataannya tenaga kerja yang terserap di sektor ini hanya sedikit.

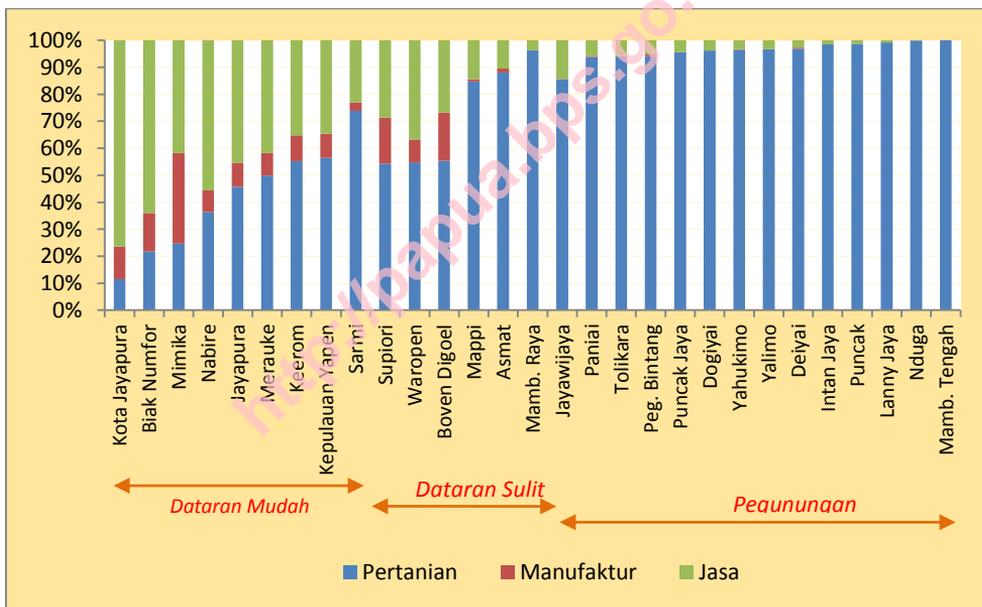
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum ada pergeseran sektor yang berarti dalam struktur perekonomian Papua. Pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan. Namun jika ditinjau menurut kabupaten/kota, ada beberapa kabupaten/kota di mana sektor pertanian bukan merupakan sektor unggulan, karena telah mengalami pergeseran ke sektor sekunder. Gambaran mengenai persentase pekerja menurut lapangan usaha dan topografi wilayah tersaji pada Gambar 5.5 berikut.

Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah dataran rendah. Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua, sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (76,47 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 11,57 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Biak Numfor di mana mayoritas pekerja terserap di sektor jasa (63,94 persen). Di samping itu, pada Kabupaten Mimika sektor jasa dan

manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di kabupaten-kabupaten dengan topografi pegunungan. Kabupaten tersebut mempunyai persentase pekerja pertanian lebih dari 90 persen. Kecuali pada Kabupaten Jayawijaya dengan persentase 85,5 persen.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan usaha dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengelompok di sektor pertanian. Walaupun ada juga pekerja dengan pendidikan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sebanyak 4.328 orang atau sekitar 4,1 persen. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan usaha lain, sehingga mereka terpaksa bekerja di

sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan buruh tani).

Tabel 5.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	774.240	208.639	116.279	87.870	4.328	1.191.356
Pertambangan ²⁾	2.539	4.004	3.076	14.190	1.897	25.706
Industri	1.961	4.884	4.744	9.800	1.049	22.438
LGA ³⁾	58	-	-	887	299	1.244
Konstruksi	2.690	4.767	6.444	16.006	4.755	34.662
Perdagangan ⁴⁾	9.506	22.208	28.558	50.347	8.219	118.838
Transportasi ⁵⁾	3.389	9.359	14.592	27.254	1.317	55.911
Lembaga Keuangan ⁶⁾	397	648	1.326	7.565	9.023	18.959
Jasa ⁷⁾	2.239	5.061	10.470	73.423	74.025	165.218
Jumlah	797.019	259.570	185.489	287.342	104.912	1.634.332

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Jika lapangan usaha kita rinci lagi menjadi 9 sektor, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan level lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 55,20 persen adalah lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor industri, listrik dan gas, konstruksi, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa di mana hampir 50 persennya menyerap pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.

Tabel 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	64,99	17,51	9,76	7,38	,36	100,00
Pertambangan ²⁾	9,88	15,58	11,97	55,20	7,38	100,00
Industri	8,74	21,77	21,14	43,68	4,68	100,00
LGA ³⁾	4,66	0,00	0,00	71,30	24,04	100,00
Konstruksi	7,76	13,75	18,59	46,13	13,72	100,00
Perdagangan ⁴⁾	8,00	18,69	24,03	42,37	6,92	100,00
Transportasi ⁵⁾	6,06	16,74	26,10	48,75	2,36	100,00
Lembaga Keuangan ⁶⁾	2,09	3,42	6,99	39,90	47,59	100,00
Jasa ⁷⁾	1,36	3,06	6,34	44,44	44,80	100,00
Jumlah	48,77	15,88	11,35	17,58	6,42	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Keterangan:

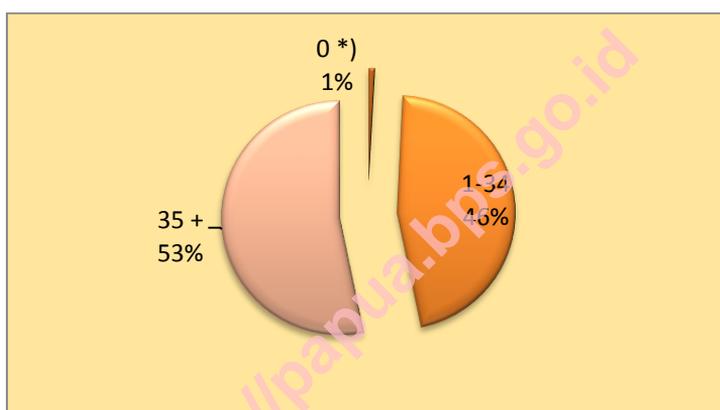
- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Listrik, Gas, Uap, dan Air
- 4 : Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 5 : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 6 : Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 7 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran

karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Gambar 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Secara keseluruhan persentase pekerja terbesar bekerja di atas 35 jam yaitu lebih dari 50 persen. Sementara itu pekerja dengan jam kerja antara 1 sampai 34 jam ada sebanyak 46 persen atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Sedangkan pekerja yang sementara tidak bekerja mempunyai persentase sekitar 1 persen.

Tabel 5.7 berikut menyajikan Gambaran mengenai jumlah pekerja menurut jumlah jam kerja dan lapangan usaha. Pada umumnya sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam). Khusus pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang bekerja di atas 35 jam dengan di bawah jam kerja normal mempunyai jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu masing-masing secara persentase 56,59 persen dan 42,82 persen. Sebaliknya, pada sektor-sektor lain minimal 75 persen pekerjaanya bekerja pada jam kerja normal.

Tabel 5.7 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua Tahun 2013

Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	6.945	674.246	510.165	1191.356
Pertambangan	93	2.768	22.845	25.706
Industri	485	3.826	18.127	22.438
LGA	0	271	973	1.244
Konstruksi	627	2.963	31.072	34.662
Perdagangan	1.991	25.343	91.504	118.838
Transportasi	668	4.604	50.639	55.911
Lembaga Keuangan	305	2.780	15.874	18.959
Jasa	1.407	34.287	129.524	165.218
Jumlah	12.521	751.088	870.723	1.634.332
%	0,77	45,96	53,28	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

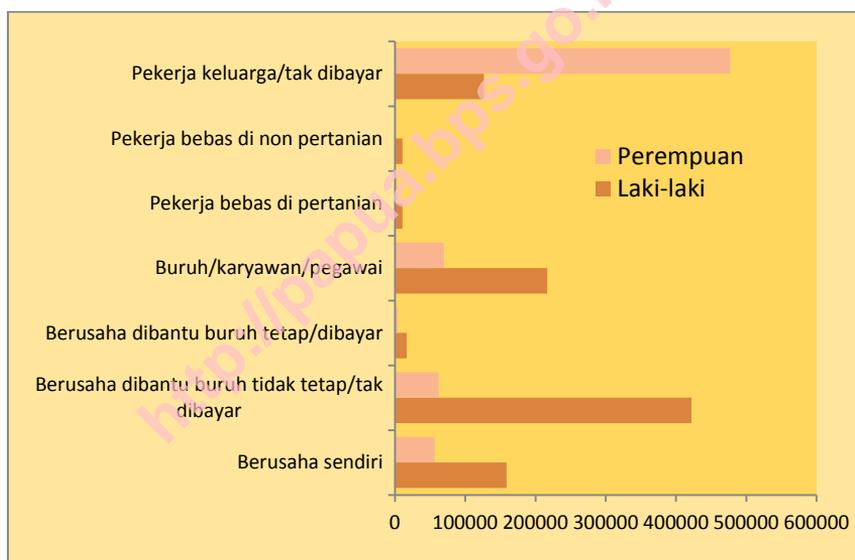
Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan pekerja adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 36,94 persen dan 29,62 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 17,51 persen.

Bila ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Secara persentase besarnya adalah 79,1 persen, dan sisanya 20,9 adalah laki-laki. Ketimpangan lain terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai, di mana

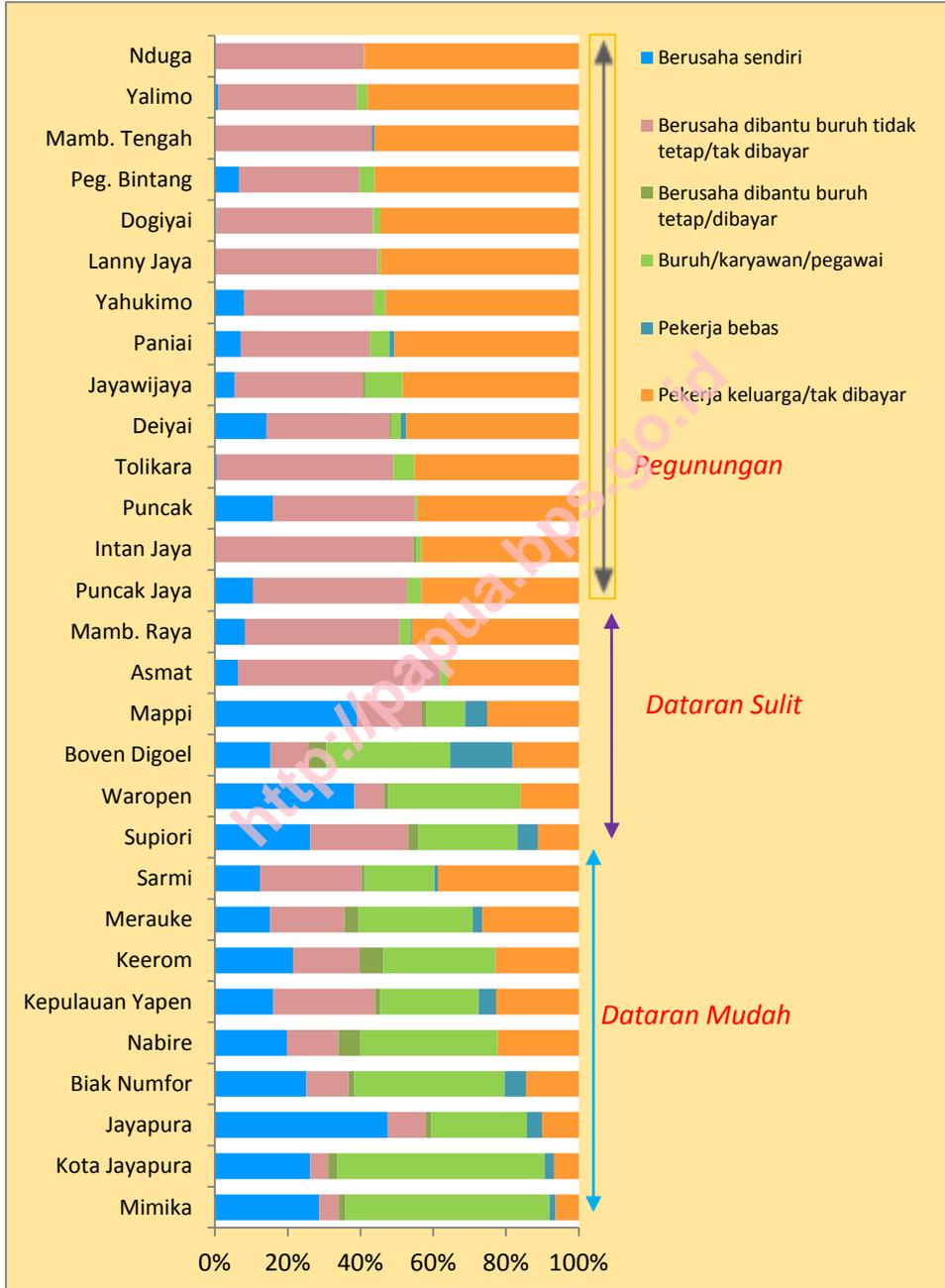
lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 216.771 orang (75,7 persen), sementara perempuan hanya sebanyak 69.481 orang (24,3 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki lebih dominan dalam hal pekerjaan. Meskipun pada status pekerja keluarga perempuan lebih mendominasi, namun kenyataannya mereka tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan.

Gambar 5.7 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Gambar 5.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013

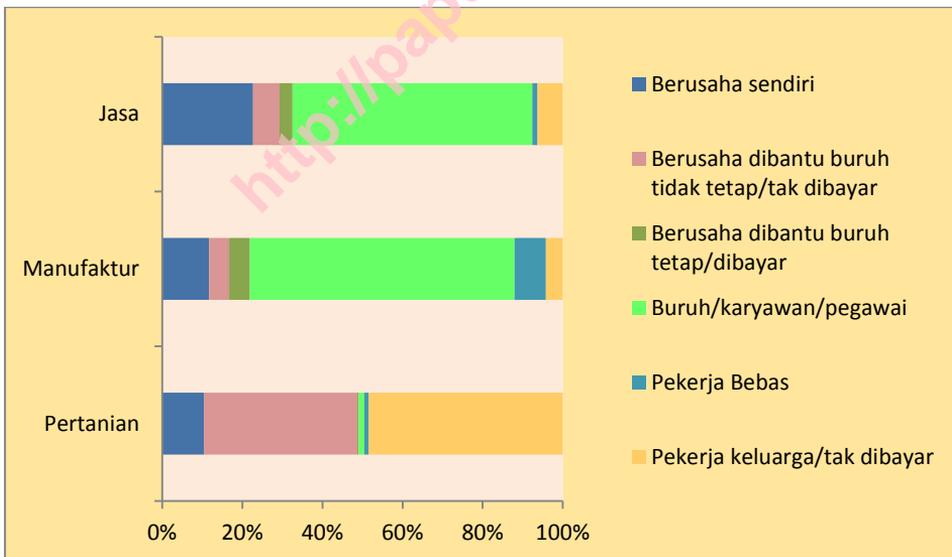


Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Gambaran mengenai distribusi pekerja menurut status pekerjaan menurut topografi disajikan pada Gambar 5.8 di atas. Pada beberapa kabupaten di dataran mudah terlihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja dengan status buruh//karyawan. Lain halnya dengan wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Paniai, dan Dogiyai, yang mempunyai kecenderungan bahwa mayoritas pekerjaannya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, di daerah pegunungan, penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan relatif sangat sedikit.

Sebagian besar pekerja di pegunungan berstatus sebagai pekerja tak dibayar.

Gambar 5.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

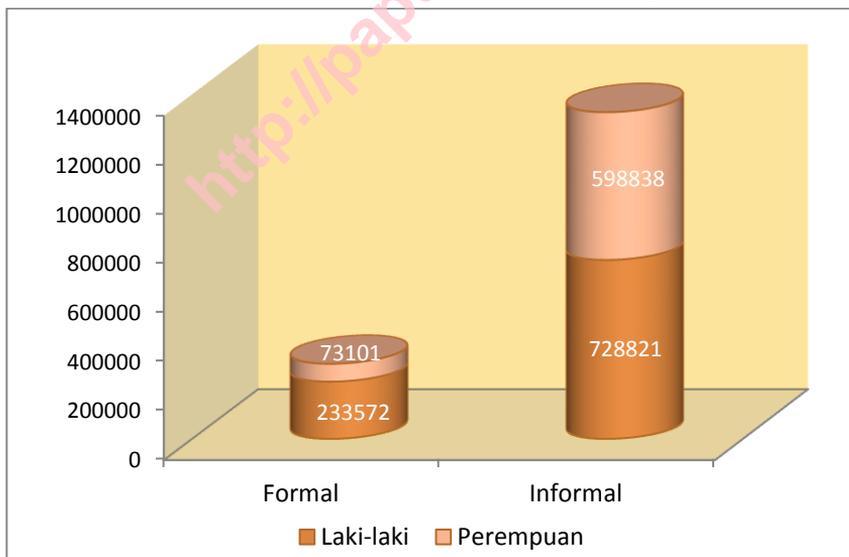
Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, maka jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara pertanian, manufaktur, dan jasa. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga

dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, masing-masing memiliki persentase 48,47 persen dan 38,28 persen. Sementara itu sektor manufaktur lebih didominasi oleh pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan di mana persentasenya mencapai 66,09 persen. Demikian halnya dengan sektor jasa sebanyak 59,92 persennya merupakan pekerja dengan status buruh/karyawan.

5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Fomal Informal

Sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Bab II tentang klasifikasi sektor formal dan informal, hanya sekitar 18,76 persen penduduk bekerja di sektor formal, sisanya 81,24 persen merupakan pekerja sektor informal.

Gambar 5.10 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013



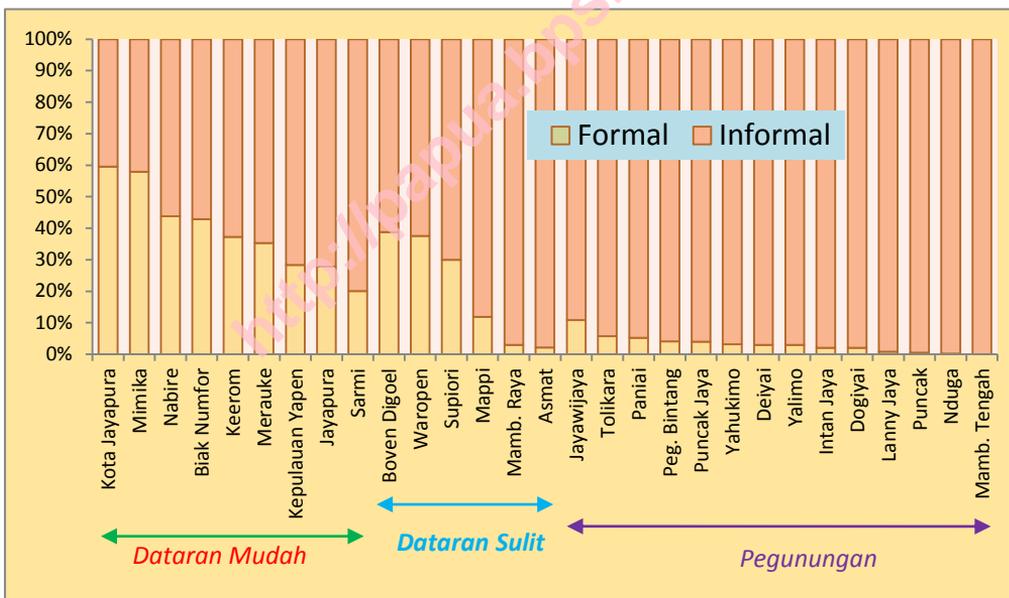
Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa sektor formal lebih banyak didominasi oleh laki-laki,

sedangkan sektor informal relatif seimbang antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Banyaknya pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan tingginya persentase pekerja sektor informal.

Gambar 5.11 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Topografi di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Jika dilihat sebaran pekerja formal dan informal di kabupaten/kota di Provinsi Papua terlihat bahwa pekerja formal lebih banyak terdapat di daerah dataran mudah. Di pihak lain, pekerja informal lebih banyak mendominasi di daerah pegunungan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.bps.go.id>

BAB VI. PENGANGGURAN

<http://paperkit.io>

BAB VI

PENGANGGURAN

6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

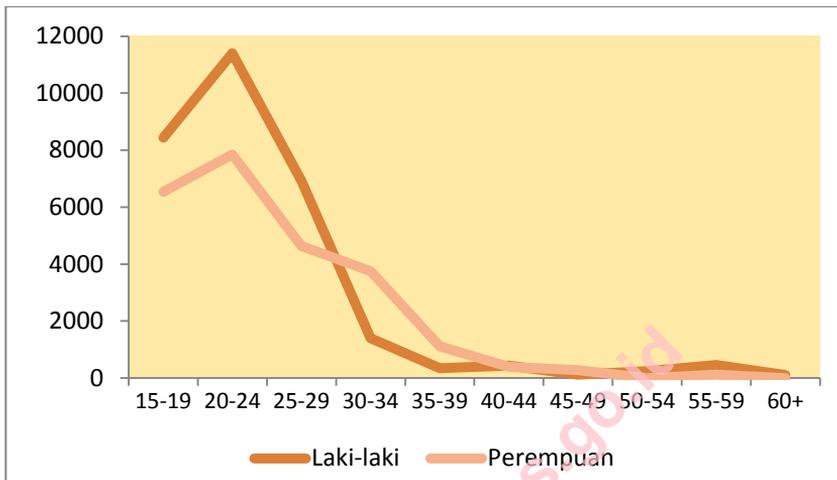
Pada tahun 2013, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 54.544 orang atau sebesar 2,52 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini adalah terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali bahwa seseorang yang bekerja membantu orang tuanya walaupun sebentar asalkan lebih dari 1 jam dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja.

Jumlah pengangguran di Papua sebesar 54.544 orang

Gambar 6.1 berikut menggambarkan jumlah pengangguran yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Jumlah pengangguran paling tinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditengarai karena sebagai output dari dunia pendidikan. Pada umur-umur tersebut banyak orang yang setelah lulus sekolah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun

Gambar 6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

6.2 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, sebagian besar pengangguran di Papua adalah laki-laki yaitu 29.865 orang atau sekitar 54,8 persen. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, pengangguran terbanyak terjadi di Kota Jayapura sebesar 12.965 orang. Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di ibukota provinsi ini, mengingat lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain.

Di beberapa kabupaten, angka pengangguran mencapai nol persen. Artinya semua angkatan kerja terserap seluruhnya dalam pasar kerja yang ada. Kabupaten tersebut diantaranya adalah: Paniai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Deiyai. Jika ditinjau lebih dalam, kabupaten-kabupaten yang memiliki angka pengangguran nol persen adalah kabupaten yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Tabel 6.1 Pengangguran menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	2.852	2.479	5.331
9402. Jayawijaya	752	243	995
9403. Jayapura	2.000	1.426	3.426
9404. Nabire	2.930	365	3.295
9408. Kepulauan Yapen	1.444	1.086	2.530
9409. Biak Numfor	2.645	2.589	5.234
9410. Paniai	0	0	0
9411. Puncak Jaya	359	295	654
9412. Mimika	2.132	3.897	6.029
9413. Boven Digoel	783	390	1.173
9414. Mappi	528	429	957
9415. Asmat *)	-	-	-
9416. Yahukimo	133	58	241
9417. Pegunungan Bintang	824	595	1.419
9418. Tolikara	1.752	438	2.190
9419. Sarmi	688	128	816
9420. Keerom	648	745	1.393
9426. Waropen	333	190	523
9427. Supiori	460	237	697
9428. Mamberamo Raya	177	177	354
9429. Nduga	790	0	790
9430. Lanny Jaya	0	0	0
9431. Mamberamo Tengah	0	0	0
9432. Yalimo	54	0	54
9433. Puncak	740	439	1.179
9434. Dogiyai	824	1.296	2.120
9435. Intan Jaya	179	0	179
9436. Deiyai	0	0	0
9471. Kota Jayapura	5.788	7.177	12.965
Jumlah	29.865	24.679	54.544

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

6.3 Pengangguran menurut Keegiatannya

Pengangguran menurut kegiatannya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/ merasa tidak mungkin dapat kerja, dan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tabel 6.2 berikut menyajikan Gambaran tentang jumlah pengangguran menurut jenis kelamin dan kegiatannya.

Tabel 6.2 Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	22.221	17.461	39.682	72,75
Mempersiapkan Usaha	227	42	269	0,49
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	6.012	6.323	12.335	22,61
Sudah punya tapi belum mulai kerja	1.405	853	2.258	4,14
Jumlah	29.865	24.679	54.544	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sebesar 72,75 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengangguran di Papua adalah mencari pekerjaan

Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 0,49 persen. Mempersiapkan usaha cenderung

pada pekerjaan yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta sangat kecil, dan mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 4,14 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

6.4 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

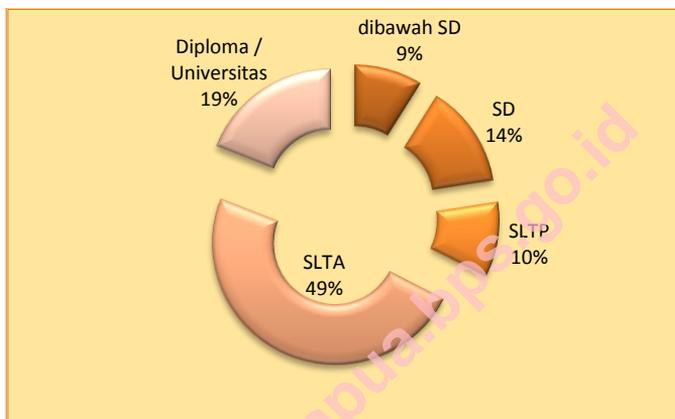
Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Secara absolut, jumlah pengangguran di Papua terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada Gambar 6.2. Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebesar 48,50 persen. Selanjutnya adalah diploma/universitas sebesar 19 persen.

Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan tinggi

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki. Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, mereka memiliki

kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan menengah/tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Gambar 6.2 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013



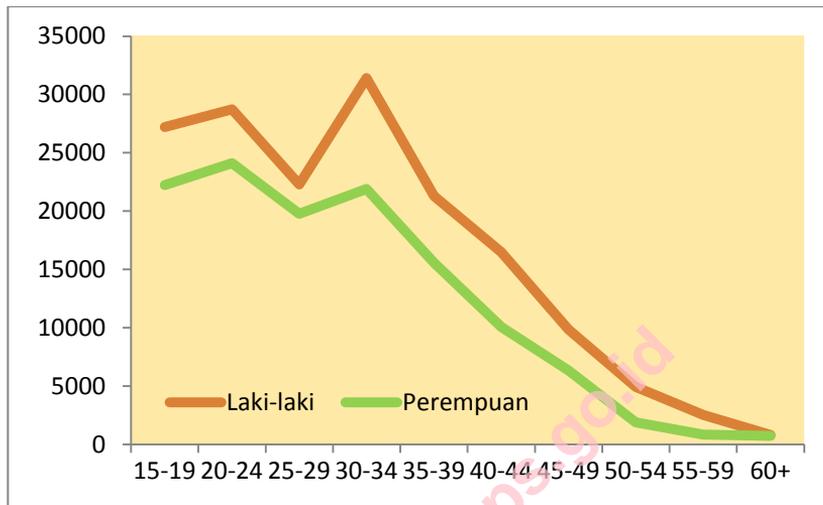
Sumber: Sakernas, Agustus 2013

6.5 Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2013 adalah sebanyak 751.088 orang, yang terdiri dari 288.988 orang setengah penganggur terpaksa (38,48 persen), dan 462.100 orang setengah penganggur sukarela (61,52 persen).

Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 6.3 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

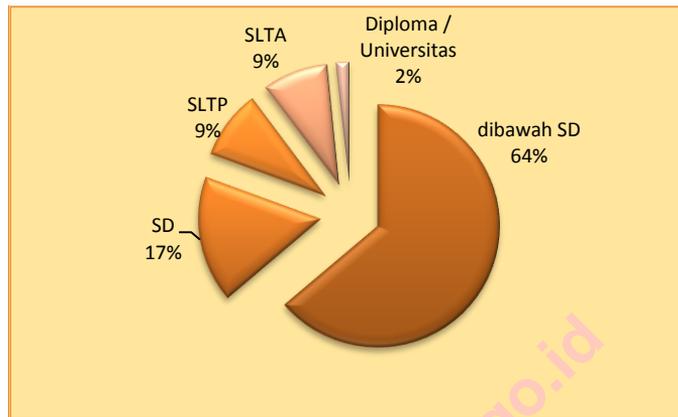


Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Pada kelompok usia ini, kecenderungan mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun.

Jika dilihat berdasarkan gender, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Meskipun pada umur-umur tertentu (25-29 tahun dan 35-39 tahun) jumlah setengah penganggur perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 6.4 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 64 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya, dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

An orange scroll banner with a white border and rounded corners, featuring a shadow effect. The text is centered on the banner.

**BAB VII.
INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN**

<http://www.bps.go.id>

BAB VII

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2013 adalah sebesar 78,01 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 86,61 persen, sementara perempuan 68,34 persen. Begitu juga TPAK pada seluruh kabupaten/kota, di mana partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

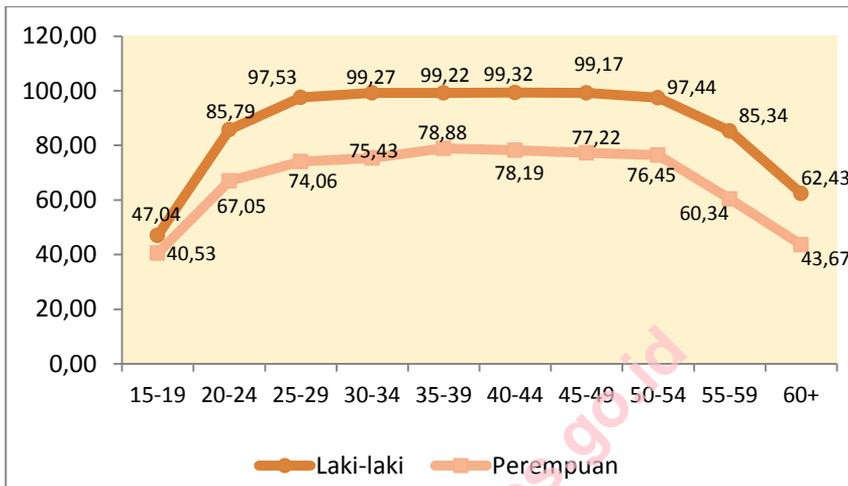
Pada tahun 2012, TPAK Provinsi Papua adalah 78,01 persen

TPAK paling tinggi terdapat di Kabupaten Mamberamo Tengah yaitu 97,55 persen, dan terendah di Kabupaten Supiori sebesar 54,90 persen. Tingginya TPAK di Mamberamo Tengah antara lain dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 40-44 tahun (99,32 persen). Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah antara umur 45-49 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 35-44 tahun.

Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada laki-laki

Gambar 7.1 TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013



Sumber: Sakernas, Agustus 2013

Tabel 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	84,48	54,41	70,36
9402. Jayawijaya	86,88	88,55	87,70
9403. Jayapura	77,04	43,47	61,52
9404. Nabire	84,05	55,21	70,81
9408. Kepulauan Yapen	79,59	56,23	68,26
9409. Biak Numfor	76,92	48,17	62,96
9410. Paniai	96,17	94,89	95,55
9411. Puncak Jaya	85,34	79,34	82,54
9412. Mimika	84,87	27,72	61,15
9413. Boven Digoel	89,64	47,85	71,30
9414. Mappi	85,08	73,24	79,43
9415. Asmat*)	-	-	-
9416. Yahukimo	92,75	83,42	88,27
9417. Pegunungan Bintang	96,93	94,16	95,64
9418. Tolikara	83,89	82,99	83,46

Kabupaten/Kota	TPAK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9419. Sarmi	82,25	66,26	75,28
9420. Keerom	85,01	53,09	70,90
9426. Waropen	81,78	26,51	55,67
9427. Supiori	75,31	32,34	54,90
9428. Mamberamo Raya	87,75	89,34	88,50
9429. Nduga	97,09	96,53	96,83
9430. Lanny Jaya	95,67	96,46	96,05
9431. Mamberamo Tengah	96,48	98,60	97,50
9432. Yalimo	87,07	90,22	88,56
9433. Puncak	91,52	71,76	81,97
9434. Dogiyai	93,34	89,32	91,30
9435. Intan Jaya	92,32	63,95	78,54
9436. Deiyai	94,71	91,87	93,30
9471. Kota Jayapura	77,90	44,00	62,18
PAPUA	86,61	68,34	78,01

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2013 adalah sebesar 3,23 persen terhadap total angkatan kerja. Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat pengangguran paling tinggi ada di Kabupaten Supiori sebesar 11,98 persen.

Kabupaten Supiori mempunyai TPT paling tinggi di Papua yaitu 11,98 persen pada tahun 2013

Menyusul berikutnya adalah Kota Jayapura sebesar 9,84 persen. Di sisi lain, pada kabupaten di daerah pegunungan tengah, seperti Kabupaten Paniai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai memiliki TPT nol persen. Artinya tidak ada pengangguran di kabupaten-kabupaten tersebut.

Tabel 7.2 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	TPT		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	4,16	6,34	4,95
9402. Jayawijaya	1,10	0,36	0,74
9403. Jayapura	5,58	8,20	6,43
9404. Nabire	6,34	1,42	4,58
9408. Kepulauan Yapen	5,84	6,60	6,14
9409. Biak Numfor	7,08	11,74	8,81
9410. Paniai	0,00	0,00	0,00
9411. Puncak Jaya	0,92	0,92	0,92
9412. Mimika	2,94	23,22	6,76
9413. Boven Digoel	3,69	4,41	3,90
9414. Mappi	2,12	2,19	2,15
9415. Asmat*)	-	-	-
9416. Yahukimo	0,31	0,12	0,22
9417. Pegunungan Bintang	3,34	2,83	3,11
9418. Tolikara	4,48	1,26	2,97
9419. Sarmi	5,83	1,74	4,26
9420. Keerom	3,60	8,36	5,17
9426. Waropen	4,17	8,20	5,08
9427. Supiori	10,98	14,56	11,98
9428. Mamberamo Raya	3,07	3,37	3,21
9429. Nduga	2,77	0,00	1,47
9430. Lanny Jaya	0,00	0,00	0,00
9431. Mamberamo Tengah	0,00	0,00	0,00
9432. Yalimo	0,29	0,00	0,15
9433. Puncak	2,22	1,80	2,04
9434. Dogiyai	2,99	4,78	3,88
9435. Intan Jaya	1,23	0,00	0,75
9436. Deiyai	0,00	0,00	0,00
9471. Kota Jayapura	6,54	16,60	9,84
PAPUA	3,01	3,54	3,23

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sektor-sektor yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen.

Semakin tinggi TKK, makin banyak tenaga kerja yang terserap pada sektor-sektor yang ada

Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Dari Tabel 7.3 berikut secara umum TKK di Provinsi Papua tergolong tinggi, bahkan di hampir semua kabupaten di daerah pegunungan mempunyai TKK sebesar 100 persen, seperti Paniai, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai.

Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sektor pertanian yang masih tradisional.

Tabel 7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	TKK		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
9401. Merauke	95,84	93,66	95,05
9402. Jayawijaya	98,90	99,64	99,26
9403. Jayapura	94,42	91,80	93,57
9404. Nabire	93,66	98,58	95,42
9408. Kepulauan Yapen	94,16	93,40	93,86
9409. Biak Numfor	92,92	88,26	91,19
9410. Paniai	100,00	100,00	100,00
9411. Puncak Jaya	99,08	99,08	99,08
9412. Mimika	97,06	76,78	93,24
9413. Boven Digoel	96,31	95,59	96,10
9414. Mappi	97,88	97,81	97,85
9415. Asmat*)	-	-	-
9416. Yahukimo	99,69	99,88	99,78
9417. Pegunungan Bintang	96,66	97,17	96,89
9418. Tolikara	95,52	98,74	97,03
9419. Sarmi	94,17	98,26	95,74
9420. Keerom	96,40	91,64	94,83
9426. Waropen	95,83	91,80	94,92
9427. Supiori	89,02	85,44	88,02
9428. Mamberamo Raya	96,93	96,63	96,79
9429. Nduga	97,23	100,00	98,53
9430. Lanny Jaya	100,00	100,00	100,00
9431. Mamberamo Tengah	100,00	100,00	100,00
9432. Yalimo	99,71	100,00	99,85
9433. Puncak	97,78	98,20	97,96
9434. Dogiyai	97,01	95,22	96,12
9435. Intan Jaya	98,77	100,00	99,25
9436. Deiyai	100,00	100,00	100,00
9471. Kota Jayapura	93,46	83,40	90,16
PAPUA	96,99	96,46	96,77

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

7.4 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.401.848 orang, dan meningkat 54 persen menjadi 2.165.070 orang pada tahun 2013. Selama kurun waktu 2008 hingga 2013, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan. Pada tahun 2012 terjadi penurunan TPT dari 3,63 persen menjadi 3,23 persen, dan diiringi juga dengan penurunan TPAK dari 78,91 persen menjadi 78,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 7.4 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2009-2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	1.128.036	1.510.176	1.536.728	1.585.434	1.688.876
Bukan Angkatan Kerja	322.815	354.413	422.164	423.711	476.194
Usia Kerja	1.450.851	1.864.589	1.958.892	2.009.145	2.165.070
TPAK	77,75	80,99	78,45	78,91	78,01
TPT	4,08	3,55	3,94	3,63	3,23
TKK	95,92	96,45	96,06	96,37	96,77

Sumber: Sakernas, Agustus 2009-2013

7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Tabel 7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9401. Merauke	19233	22614	3483	45330
9402. Jayawijaya	13372	3556	1989	18917
9403. Jayapura	14131	16781	2392	33304
9404. Nabire	12806	14167	2722	29695
9408. Kepulauan Yapen	7753	9486	1925	19164
9409. Biak Numfor	12554	19585	2795	34934
9410. Paniai	2012	1831	1258	5101
9411. Puncak Jaya	5986	6069	3005	15060
9412. Mimika	17473	35820	3377	56670
9413. Boven Digoel	3605	8137	353	12095
9414. Mappi	5612	4729	1177	11518
9415. Asmat*)	[1426]	[8026]	[3050]	[1250]
9416. Yahukimo	4834	6830	2620	14284
9417. Pegunungan Bintang	879	793	411	2083
9418. Tolikara	8766	2294	3555	14615
9419. Sarmi	3369	2446	474	6289
9420. Keerom	4401	5942	705	11048
9426. Waropen	2263	5480	458	8201
9427. Supiori	1874	2342	563	4779
9428. Mamberamo Raya	748	509	175	1432
9429. Nduga	1076	152	537	1765
9430. Lanny Jaya	3870	0	541	4411
9431. Mamberamo Tengah	740	0	0	740
9432. Yalimo	2265	237	2093	4595
9433. Puncak	758	7603	4321	12682
9434. Dogiyai	2154	2187	865	5206
9435. Intan Jaya	532	5704	325	6561
9436. Deiyai	2170	820	87	3077
9471. Kota Jayapura	36531	37196	6409	80136
Jumlah	193193	231336	51665	476.194

Sumber: Sakernas, Agustus 2013

*) : Sampel tidak mencukupi estimasi kabupaten.

Bahasan ini sengaja ditampilkan satu bab bersama indikator ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui penyebaran penduduk bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 48,58 persen. Selanjutnya penduduk yang bersekolah sebesar 40,57 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 10,85 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di masing-masing kabupaten/kota berada pada rentang 740 (Mamberamo Tengah) sampai 80.136 (Kota Jayapura). Nilai nol di sini bukan berarti bahwa tidak ada penduduk usia kerja yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya, tetapi lebih karena azas eksklusifitas yang menggolongkan orang hanya ke dalam satu jenis kegiatan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.bps.go.id>

BAB VIII. KESIMPULAN

<http://paperkit.io>

BAB VIII

KESIMPULAN

Tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan Gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Papua pada tahun 2013. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari publikasi ini:

i. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja di Papua pada tahun 2013 mencapai 2.165.070 orang, di mana persentase penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan jumlah terbesar penduduk usia kerja terdapat pada kelompok usia 15-19 tahun yang mencapai 16,79 persen. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan penduduk usia kerja selama seminggu yang lalu adalah bekerja dengan persentase sebesar 75 persen.

ii. Penduduk Angkatan Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Papua pada tahun 2013 adalah 1.688.876 orang. Angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun yang mencapai 17,7 persen. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah, di mana jumlahnya lebih dari separuh dari total angkatan kerja, bahkan 47,48 persennya berpendidikan tidak tamat SD.

iii. Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja di Papua pada tahun 2013 ada sebanyak 1.634.332 orang atau setara dengan 75,48 persen dari total penduduk usia kerja. Jumlah terbanyak pekerja berada pada usia 30-34 tahun yang besarnya mencapai 303.563 orang atau sekitar 18,57 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, lebih dari 63 persen pekerja memiliki pendidikan SD ke bawah. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.

iv. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 54.544 orang atau sekitar 3,23 persen dari total angkatan kerja, di mana 54,75 persen adalah laki-laki dan sisanya 45,25 persen perempuan. Persentase pengangguran paling banyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Sementara itu, lebih dari separuh penganggur adalah berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Menurut kegiatannya, pengangguran karena mencari pekerjaan mempunyai persentase paling besar yaitu sebesar 72,75 persen.

v. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum TPAK di Provinsi Papua tergolong tinggi, yaitu sebesar 78,01 persen. Tingkat partisipasi laki-laki lebih besar dibanding perempuan di semua kabupaten/kota.

vi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2013, TPT Provinsi Papua adalah sebesar 3,23 persen. Kabupaten Supiori memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Papua, yaitu sebesar 11,98 persen. Sedangkan di beberapa kabupaten di pegunungan mempunyai TPT sebesar nol persen.

vii. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dibanding tahun 2011, kondisi ketenagakerjaan di Papua memperlihatkan adanya perbaikan. Tingkat pengangguran menurun, demikian juga dengan TPAK.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papua.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Gedung Pelni Lantai 3 Jalan Argapura Atas No. 15 Jayapura-Papua
Telp: 0967-534519, 533028 (hunting) Fax: 536490
E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>